BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian, menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengklasifikasian aset tetap ditentukan dari awal pembelian dengan kriteria tertentu dan digolongkan sesuai dengan jenisnya. Aset tetap yang dimiliki yaitu: 1)Tanah, 2)Peralatan dan Mesin, 3)Gedung dan Bangunan, 4)Jaringan 5)Aset tetap lainnya, 6)Konstruksi dalam pengerjaan.

Pengakuan aset tetap terjadi saat pemindahan kepemilikan dan tercatatnya aset pada SIMAK-BMN. Pengukuran aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. Penyusutan aset tetap dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN. Berdasarkan hal tersebut perlakuan akuntansi atas aset tetap yang diterapkan meliputi pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, dan penyusutan telah sesuai sebagaimana yang tertera pada PSAP No. 07 atas Aset Tetap.

Selanjutnya, mengenai pertukaran aset tetap tidak pernah dilakukan karena tidak diperbolehkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman atas pertukaran aset tetap yang seharusnya boleh dilakukan menjadi

tidak diperbolehkan. Selain itu, tidak ada informasi mengenai dilakukannya penghentian aset tetap terhadap aset tetap yang akan dilelang. Penghentian aset dilakukan melalui penghapusan aset yang didasarkan dari Risalah Lelang yang diberikan oleh KPKNL setelah aset tetap berhasil terjual dalam proses lelang.

5.2. Saran

Berikut saran yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Perwakilan BKKBN Povinsi Jawa Timur:
   a. Sebaiknya Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa timur tetap mempertahankan pencatatan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan mendalami lagi pemahaman dari pencatatan dan perlakuan akuntansi yang selanjutnya diterapkan.
   b. Diperlukan karyawan yang benar-benar paham terhadap pentingnya perlakuan akuntansi aset tetap agar pencatatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Penelitian Selanjutnya:
   a. Jika penelitian selanjutnya ingin mengambil topik yang relevan, disarankan agar mengambil ditempat Perwakilan yang berbeda.
   b. Jika penelitian selanjutnya ingin meneliti ditempat yang sama, disarankan agar mengambil topik yang berbeda.

5.3. Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini yaitu Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dapat mempertahankan pencatatan dan penyajian laporan keuangan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Serta dapat memahami perlakuan akuntansi atas aset tetap mengenai hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Maka dari itu, kemungkinan risiko terhadap kesalahpahaman penafsiran dan pencatatan akan menjadi kecil.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE
PERBANAS

DAFTAR PUSTAKA

Afrilinda, A. (2015). *Akuntansi Aset Tetap Pada Bank Nagari Cabang Pembantu UNP* (Tugas Akhir, Universitas Andalas Padang, Indonesia). Diunduh dari http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/652

Arif, B., Muchlis, dan Iskandar. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia.

Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Christianingsih, E. (2007). *Metodologi Sosial dan Pendidikan*.

Daim, N. (2014). *Tata Usaha Negara*. Jakarta: Penerbit Gramedia.

Dwitayanti, Y., Zahara, H. (2018). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap. *4*(1): 81–96.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual. 2014. Jakarta.

Lestari, O. (2017). *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak 45 Pada Yayasan Barunawati Biru Surabaya*. (Tugas Akhir, STIE Perbanas Surabaya, Indonesia).

Merina, C. I.,Verawaty., dan Manoppo, F. A. (2014). Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Sosial Propinsi Sumatera Selatan 1. (07): 1–8.

Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya.

Nurdin, I., dan Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Surabaya.

Ratmono, D., & Sholihin, M. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual* (Kedua). Jogjakarta: UPP STIM YKPN.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(1), 21–36. Diunduh dari http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/497/521